

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami Kewenangan KPU dalam mekanisme penundaan Pemilu di Negara Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penundaan Pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa KPU memiliki wewenang untuk menunda pemilu. Namun, hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Penundaan tanpa alasan kuat dianggap inkonstitusional dan berpotensi membahayakan negara, termasuk risiko korupsi. Penundaan hanya dapat dianggap sah melalui amandemen UUD NRI 1945 atau Dekrit Presiden. Meski tidak diatur secara eksplisit, penafsiran hukum menggunakan metode grammatical, noscitur a sociis, dan ejusdem generis digunakan untuk memahami ketentuan dalam UU Pemilu. Penundaan pemilu tidak hanya melanggar konstitusi tetapi juga dapat mengancam stabilitas negara.

Kata Kunci: Kewenangan KPU; Penundaan Pemilihan Umum; Konstitusi

ABSTRACT

This research was conducted to know and understand the authority of the KPU in the mechanism of postponing elections in the State of Indonesia. In this research, the author uses normative juridical research methods. The data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. From the results of the research, it can be concluded that the legal basis for postponing elections is regulated in Law No. 7 of 2017 concerning Elections, which states that the KPU has the authority to postpone elections. However, this is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which mandates that elections be held every five years. Postponement without a strong reason is considered unconstitutional and has the potential to endanger the country, including the risk of corruption. A postponement can only be considered valid through an amendment to the 1945 Constitution or a Presidential Decree. Although not explicitly regulated, legal interpretation using grammatical, noscitur a sociis, and ejusdem generis methods are used to understand the provisions in the Election Law. The postponement of elections not only violates the constitution but can also threaten state stability.

Keywords: Authority of KPU; Postponement of General Election; Constitution